

DIVERSIFIKASI PENDIDIKAN PESANTREN: TANTANGAN DAN SOLUSI

Fuaduddin TM

Abstract

Pesantren has been recognized as educational institution that has played a role in civilizing and enlightening the life of Indonesian people. In one side, pesantren institution potentially can give society education service. But in another side, there are many of alumni of pesantren who are difficult either to continue their study to higher education or to seek job especially in the public sector or other formal sectors. This condition is one of modern phenomena which strictly demands differentiation, specialization and professionalization. This paper talks about the development of various orientation of pesantren education system, the challenges faced, and strategic actions should be done.

Keywords: *education system of pesantren, social mobility, umat.*

I. PENDAHULUAN

Pada saat ini tidak kurang dari tiga setengah juta anak bangsa sedang

Lahir di Indramayu, 8 April 1946.
Pendidikan S1 ditempuh di IAIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, tahun 1975,
selanjutnya menyelesaikan S2 (Master of
Education) di Univ. of Pittsburgh, USA
tahun 1982. Saat ini sebagai Ahli Peneliti
Utama pada Puslitbang
Pendidikan Agama dan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat
Departemen Agama RI

belajar di berbagai pesantren di seluruh Indonesia.¹ Mereka umumnya berasal dari masyarakat lapisan bawah, keluarga petani yang berpendidikan rendah, dan tinggal di daerah pedesaan. Lebih dari separuh anak-anak yang belajar di pesantren adalah perempuan.

Kalau saja potensi pesantren dapat memberikan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan iptek,² maka negeri ini akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang handal dan kompetitif untuk mengejar ketertinggalan bangsanya. SDM yang memiliki akar sosial dan kultur Indonesia, bukan SDM yang berorientasi ideologi dan nilai-nilai kultural yang diimpor dari luar baik yang fundamentalis radikal maupun yang liberal sekularistik.

Sebaliknya, bila pesantren gagal atau tidak mampu memberikan

pendidikan yang sesuai dengan tuntutan perubahan masyarakat dan perkembangan iptek/modernitas, maka alumni pesantren kemungkinan tidak siap menghadapi realitas kehidupan yang semakin kompetitif dan bisa jadi akan termarginalkan secara sosial, politik, ekonomi maupun kultural. Akibatnya mobilitas sosial dan intelektual umat akan mandeg, tetap berada pada lapisan bawah. Bila mayoritas anak bangsa ini berada pada lapisan bawah, maka sebenarnya makna kemerdekaan untuk mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat dan bangsa Indonesia seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 belum sepenuhnya bermakna bagi masyarakat pesantren.³

Bagaimana sebaiknya dunia pesantren merespon perkembangan iptek dan tuntutan perubahan yang terjadi di masyarakat. Transformasi

¹ Data tahun 2004-2005 tercatat sebanyak 14.656 pesantren terdiri dari 4.692 pesantren Salafiyah (32 %), 3.368 pesantren Ash'ariyah/Khalafiyah (23 %) dan sisanya 6.596 pesantren kombinasi (45 %). Jumlah santri mencapai 3.369.193 orang terdiri dari 48,5 % khusus mengaji dan 51,5 % mengaji dan sekolah (Departemen Agama, 2005)

² Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan iptek adalah pendidikan yang seimbang dan terpadu antara dimensi keimanan, moral dan intelektual, atau pendidikan yang seimbang dan terpadu antara penguasaan ilmu-ilmu agama (*tafaqquh fiddin*) dan penguasaan sains dan teknologi yang didasari oleh nilai-nilai moral agama (*imtak*).

³ Lihat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

sistem pendidikan pesantren yang gradual bahkan *incremental* ternyata belum sepenuhnya mampu merespon perubahan masyarakat dan perkembangan iptek yang berubah dengan cepat. Bagaimana komunitas pesantren memahami prinsip "*Al muhaafadhotu alal qadiimish shaalih, wal akhdu bil jadidil ashlah*" mampu beradaptasi secara cerdas dan arif terhadap sistem pendidikan di luarnya sehingga pesantren dapat memerankan diri sebagai pusat keagamaan dan pusat pendidikan yang memenuhi tuntutan masyarakat dan perkembangan iptek.

Lembaga pesantren berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 telah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Pesantren memiliki kesempatan meningkatkan perannya dalam rangka mencerdaskan bangsa seperti yang dirumuskan dalam tujuan sisdiknas "mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga

negara yang demokratis serta bertanggung jawab". UU Nomor 20 Tahun 2003 telah menetapkan prinsip penyelenggaraan pendidikan yang demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Tuntutan undang-undang tersebut dituangkan lebih lanjut dalam renstra pendidikan nasional tahun 2005-2009 yang diarahkan pada peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan, peningkatan relevansi dan peningkatan efisiensi penyelenggaraan.⁴

A. Diversifikasi Pendidikan Pesantren

Sebagai lembaga yang identik dengan makna keislaman sekaligus "mengandung makna keaslian Indonesia" (*indigenous*), pesantren dengan kiainya telah memainkan peran-peran strategis di bidang dakwah keagamaan, pendidikan, dan peran-peran sosial lainnya. Keterlibatan lembaga pesantren dalam program-program wajar Dikdas, pelayanan kesehatan, jaringan informasi, pertanian, pemberdayaan ekonomi masyarakat, lingkungan hidup, keluarga

⁴ Lihat Rencana Strategis Depdiknas Tahun 2005-2009, *Menuju Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2025* hal. 43-62.

berencana, dan sebagainya menunjang pesantren cukup responsif dan dipercaya masyarakat dan pemerintah untuk mengisi peran-peran tersebut. Pesantren bukan hanya memainkan fungsi-fungsi tradisionalnya berupa transmisi ilmu-ilmu Islam, pemeliharaan tradisi Islam dan reproduksi ulama, tetapi juga berperan sebagai pusat pembangunan berbasis masyarakat (*community based development*) dan pembangunan berbasis pada nilai (*value-oriented development*) (Madjid; 1997, Azra; 2002).

Setelah secara formal legalistik diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pesantren memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya mampu memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi umat. Selain untuk pelayanan dakwah agama, pesantren dituntut untuk memungsikan sebagai institusi pendidikan penyeimbang bahkan terintegrasi antara penguasaan ilmu-ilmu agama (*tafaqquh fiddin*) dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan yang sebenarnya sudah lama berlangsung dalam rangka adaptasi terhadap tuntutan modernitas dan sistem yang berada di luarnya. Hampir 70 % pesantren sudah menyelenggarakan pendidikan formal baik dalam bentuk madrasah maupun sekolah.

Adaptasi yang dilakukan secara gradual dengan penuh kehati-hatian ternyata belum sepenuhnya menjadikan pesantren sebagai lembaga pendidikan alternatif yang alumnya mampu bersaing dalam masyarakat yang semakin kompetitif. Pesantren masih lebih memerankan sebagai lembaga keagamaan dengan tugas-tugas sosialisasi nilai-nilai agama dibandingkan sebagai lembaga pendidikan yang berorientasi ke depan.

Dalam dasawarsa terakhir pesantren telah mengalami perubahan yang signifikan sesuai dengan perubahan lingkungan strategis yang terjadi baik pada tingkat lokal, nasional maupun global. Secara kualitatif perubahan ditandai dengan semakin beragamnya tingkat pendidikan masyarakat yang menyebabkan semakin beragamnya orientasi dan kebutuhan jenis pendidikan. Karena pendidikan pada dasarnya selalu memiliki hubungan timbal balik dengan sistem yang ada di luarnya.

Dunia pesantren telah berhasil mempertahankan eksistensinya dalam kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu. Sampai saat ini pun ia tetap *survive* sekalipun masyarakat telah mengalami perubahan di berbagai bidang akibat proses modernisasi dan globalisasi. Dunia pendidikan pesan-

tren tidak saja *responsif* terhadap perubahan sistem yang ada di luarnya tetapi ia juga mampu mempertahankan nilai, karakter dan tradisi pendidikan yang dianutnya.

Dalam perspektif kultural, sistem pendidikan pesantren menempati posisi strategis dalam pembangunan budaya bangsa. Melalui pendidikan pesantren proses sosialisasi nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat yang bersumber dari ajaran agama dapat berlangsung secara terus menerus yang pada gilirannya akan menjadi fondasi bangunan karakter dan jati diri bangsa pada saat berhadapan dengan budaya luar. Dengan pendidikan pesantren yang “modern” potensi seseorang dapat dikembangkan secara optimal melalui pengajaran sains dan teknologi, berbagai keterampilan hidup dan nilai-nilai modernitas seperti etos belajar, disiplin, berfikir rational, orientasi ke depan, keterbukaan, demokrasi, toleran, egaliter, etos kerja, yang mengantarkan suatu masyarakat siap berkompetisi dalam persaingan global (Adamas;1977)

Pendidikan pesantren yang baik juga mampu melahirkan warga negara yang cinta tanah air, yang senantiasa mengusung semangat persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga kehormatan dan keutuhan negara melalui pendidikan kewarganegaraan (*civic education*),

mempelajari bahasa dan budaya nasional, menanamkan nilai-nilai multikultural, demokrasi dan HAM. Melalui pendidikan pesantren diharapkan akan menghasilkan lapisan masyarakat terdidik serta para elite bangsa yang mampu melakukan proses pencerahan yang akan membangun peradaban bangsa yang bermartabat dan disegani dalam pergaulan dunia (Jarolimek; 1981). Hal tersebut terbukti dalam sejarah republik ini banyak tokoh pejuang, pimpinan nasional, cendekiawan, pendidikan, budayawan, pebisnis yang dilahirkan dari pendidikan pesantren atau paling tidak pernah memperoleh pendidikan di pesantren.

Dilihat dari perspektif ketenagaan, melalui pendidikan pesantren diharapkan dapat menghasilkan tenaga-tenaga kerja terampil mandiri yang siap bekerja di sektor pertanian dan sektor informal. Karena itu pendidikan pesantren akan mampu meningkatkan produktifitas yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dan negara. Tenaga terdidik memiliki kemampuan untuk mengadopsi berbagai teknologi dan penerapannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya manusia (SDM) terdidik merupakan *human*

investment yang lebih berharga dibandingkan dengan sumber daya alam (SDA) (Schultz; 1977).

Dengan kata lain bagaimana sistem pendidikan pesantren mampu memerankan peran ganda; *pertama*, peran sosialisasi yaitu meneruskan dan melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat, sehingga nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat menjadi *core value* bagi pembangunan bangsa, dan *kedua*, peran perubahan sosial (*social change*) dengan mengajarkan iptek, berbagai keterampilan dan nilai-nilai modernitas yang menjadikan masyarakat maju dan mampu berkompetisi dalam persaingan global.

Perkembangan dan beragamnya model pesantren memiliki kaitan dengan perkembangan pemikiran keagamaan yang terjadi di dunia Islam. Dalam era globalisasi arus informasi dunia Islam dan perkembangan pemikiran agama dengan mudah merambah ke mancanegara termasuk masyarakat muslim di Indonesia. Mudah dipahami bila muncul sejumlah pesantren yang orientasi pendidikannya beragam. Perkembangan pesantren sendiri selain memperlihatkan transformasi sistem pendidikan juga merupakan refleksi dari peta pemikiran keagamaan yang ada bukan saja pada skala lokal, nasional tetapi juga internasional.

Akibat dari adaptasi yang gradual dan *incremental* yang dilakukan pesantren terhadap sistem pendidikan dari luar sedikit banyaknya mempengaruhi pemikiran dan pemahaman keagamaan yang pada gilirannya memberikan warna tersendiri terhadap pandangan hidup santri.

Bentuk perubahan sebuah pesantren terlihat lebih diwarnai oleh pemahaman keagamaan pimpinan pesantren (kiai) sebagai pemimpin karismatik yang mengajarkan faham keagamaan dan sekaligus sebagai panutan dalam pemikiran, sikap dan perilaku santri. Kiai sebagai elemen yang paling esensial dari sebuah pesantren, yang dengan kelebihan ilmunya dalam Islam, seringkali dilihat sebagai orang yang senantiasa dapat memahami keagungan Tuhan dan rahasia alam hingga mereka dianggap memiliki kedudukan yang tak terjangkau oleh kebanyakan masyarakat awam (Dhofir; 1982).

Perkembangan pemikiran dan paham keagamaan yang beragam dari pimpinan pesantren pada akhirnya akan melahirkan orientasi pendidikan dan nilai-nilai budaya pesantren yang sangat beragam. Dengan kata lain perkembangan pesantren merupakan refleksi dari peta pemahaman dan arus pemikiran keagamaan yang melahirkan pandangan hidup, sikap dan perilaku para santri yang sangat beragam pula.

Saat ini terdapat peta keragaman kultural dan orientasi sistem pendidikan pesantren yang berpengaruh dalam membentuk pemikiran, pandangan hidup dan perilaku santri.

Pertama, pesantren “salafiyah-tradisional”, pesantren yang terbatas hanya mengajarkan ilmu agama yang bersumber pada literatur Islam klasik (kitab kuning), dengan metode bandongan/wetonan, sorogan dan *bahtsul masail* untuk kelas-kelas *takhasus*. Para santri membiasakan hidup dalam kesalehan ritual (shalat berjamaah, shalatul lail, dan puasa sunnah), tahfidzul quran serta berbagai amalan keagamaan lainnya. Tidak jarang mereka membiasakan diri dengan amalan yang “sufistik” atau menjadi penganut tarekat tertentu dan kiai atau pimpinan pesantren yang menjadi mursyid. Di pesantren salafiyah-tradisional para santri khusus mempelajari ilmu agama dari kitab kuning yang memiliki standard hirarki sejak lama dan tidak pernah berubah. Sistem pembelajaran sebagian masih menggunakan metode bandongan dan sorogan. Sebagian lain menggunakan klasikal tanpa bangku dan waktu belajarnya malam hari.

Para santri pesantren salafiyah-tradisional tidak terlalu mengharapkan ijazah yang akan digunakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan

yang lebih tinggi atau menjadi pegawai negeri dan sektor formal lainnya. Para santri salafiyah-tradisional umumnya kembali ke tempat asalnya dan mendirikan pesantren, menjadi guru ngaji dan peran keagamaan lainnya. Mereka tidak masuk dalam lapangan kerja formal karenanya lebih banyak sebagai petani atau lapangan kerja informal. Beberapa pesantren salafiyah-tradisional mengembangkan program tahfidzul quran sebagai program unggulan, bahkan ada pesantren yang secara kelembagaan mengkhususkan diri pada tahfidzul quran. Pesantren tipe ini terlihat di Lirboyo Kediri, Darussalam Blok Agung Banyuwangi, dan Banjarmasin.

Kedua, pesantren “salafiyah-modern”, yaitu pesantren salafiyah yang sudah mengadopsi sistem pembelajaran klasikal, dengan memasukkan kurikulum mata pelajaran umum dan keterampilan. Namun secara kultural mereka masih tetap mempertahankan sistem salafiyahnya, seperti; sebagian kitab yang dipelajari, tradisi bandongan sebagai kegiatan non formal, amalan keagamaan, dsb. Pesantren tipe ini terlihat di; Tebuireng, Raudhatul Thalibin, dst. Di pesantren salafiyah-modern, santri siang hari belajar di madrasah (MTs dan MA) atau sekolah umum (SMP dan SMA) dengan kurikulum Departemen Agama

dan kepesantrenan, malam hari sebagian diberi kesempatan mengikuti pengajian kitab kuning. Sebagian lagi memperdalam materi yang diajarkan siang hari. Salafiyah-modern semakin lama semakin berkembang sejalan dengan perubahan orientasi pendidikan masyarakat yang memerlukan legitimasi formal untuk keperluan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja. Data terakhir menunjukkan lebih dari 70 % pesantren salafiyah telah menyelenggarakan pendidikan formal mulai dari jenjang dasar sampai perguruan tinggi. Sebagiannya masih bertahan pada pendidikan madrasah mulai dari MI sampai perguruan tinggi agama Islam, dan sebagian lagi sudah menyelenggarakan pendidikan umum, mulai dari SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi.

Ketiga, pesantren modern yang mengadopsi sistem pendidikan modern bukan saja dalam sistem pembelajaran dan kurikulumnya, namun juga dalam pemikiran yang memberikan kebebasan santrinya untuk tidak terikat dengan pemahaman keagamaan (mazhab) tertentu. Bagi pesantren ini tidak mengkaitkan mazhab tertentu yang menjadi anutan resmi kelembagaan pesantren. Kebebasan berfikir, keterbukaan dan penguatan kemampuan bahasa Arab dan Inggris mem-

bekali santrinya untuk dapat berkiprah dalam pergaulan dunia yang lebih luas. Santri di pesantren modern belajar secara klasikal dengan kurikulum terjadwal. Malam hari mereka belajar berbagai kegiatan ekstra kurikuler, penguatan bahasa, kepramukaan, olah raga, dan kegiatan ekstra kurikuler lainnya. Pesantren tipe ini seperti Gontor Ponorogo, Darunnajah Jakarta, Raudhatul Hasanah Medan, Ma'had Al-Zaytun Indramayu, dan sejumlah pesantren lainnya yang didirikan oleh para alumni Gontor.

Keempat, pesantren yang selain mengajarkan ilmu agama, juga melengkapi sistem pendidikannya dengan berbagai keterampilan seperti; pertanian, perikanan, pertukangan, otomotif, berbagai kerajinan tangan, dsb. Para santrinya bukan saja terampil dalam penguasaan ilmu agama, tetapi juga terampil dalam berbagai bidang kehidupan duniawi. Dengan program keterampilan diharapkan adanya keseimbangan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan keterampilan, antara orientasi ukhrowi dan duniawi. Pesantren Gontor melibatkan santri di semua kegiatan mulai dari pengelolaan pendidikan, ekonomi pesantren, keamanan, hubungan masyarakat, bhakti pesantren, dsb. Pesantren Darul Fallah Ciampea Bogor yang mengembangkan pesan-

tren berbasis pertanian, dimana para santrinya selain belajar agama juga dibekali berbagai keterampilan di bidang pertanian, perikanan dan agro industri lainnya.

Kelima, pesantren “salafi-haraki”, yaitu pesantren yang mendasarkan khittah pendidikannya pada paham keagamaan salafi (*haraki*) yang berusaha melakukan gerakan pemurnian ajaran Islam berdasarkan al-Qur’an dan as-Sunnah Shohihah dan berupaya melaksanakannya sebagaimana yang dilakukan oleh “tradisi salafi”. Para santri dipersiapkan menjadi kader mujahid dakwah dalam rangka penegakkan Syariat Islam. Bagi kelompok ini Islam difahami sebagai *ad-Din wa ad-Daulah*. Sebagai bagian dari arus pemikiran salafi yang sangat tekstual, normatif dan literal, terkadang pandangan, sikap dan perilaku keagamaan mereka berbeda dengan masyarakat pada umumnya (*mainstream*).

B. Tantangan yang Dihadapi Pesantren

Munculnya persoalan-persoalan akibat dari perkembangan dan perubahan zaman menyebabkan masalah-masalah yang harus dihadapi dan sekaligus dijawab oleh pesantren semakin kompleks. Hal itu kemampuan pesantren dalam merespon

kehidupan modern sedang dan akan terus diuji. Dan sebagian pesantren secara bertahap telah berhasil merespon perubahan zaman tersebut melalui proses adaptasi secara positif.

Adaptasi sistem pendidikan pesantren sangat ditentukan dan terkait dengan kepemimpinan (*leadership*) pesantren, orientasi pendidikan pesantren, paham keagamaan, dan harapan santri dengan belajar di pesantren. Pesantren yang memiliki basis perpaduan antara Keindonesiaan, Keislaman dan Keilmuan saat ini dihadapkan dengan berbagai tantangan tersebut. Berikut ini akan dikemukakan ilustrasi tentang keadaan pesantren yang merupakan tantangan pesantren yang harus dihadapi dan dijawab.

1. Kepemimpinan Pesantren

Kepemimpinan pesantren yang pernah melahirkan ulama-ulama yang produktif menulis kitab-kitab (*intellectual leader*), kemudian sebagian pimpinan pesantren karena perubahan dan tuntutan masyarakat mengalami pergeseran ke arah kepemimpinan spiritual (*spiritual leader*), dan sekarang sebagian pemimpin pesantren khususnya pesantren-pesantren besar karena tuntutan peran sosial yang lebih luas dari pesantren muncul fenomena ke arah kepemimpinan politik (*political*

leadership). Perubahan kultural dan pergeseran peran kepemimpinan pesantren akan mempengaruhi orientasi pendidikan pesantren, mengingat pimpinan pesantren menempati hirarki puncak dalam struktur sosial pesantren. Kiai adalah pemilik, guru, panutan, dan penentu kelangsungan hidup sebuah pesantren.

Akibat dari pergeseran peran intelektual kiai ini maka peran pesantren sebagai lembaga kaderisasi ulama yang menguasai khazanah pengetahuan tradisional dapat berkurang efektifitasnya. Kepakaran beberapa bidang keilmuan Islam tertentu telah bergeser kepada tokoh-tokoh kampus lulusan Timur Tengah. Dalam disiplin ilmu *tafsir, hadits, fikih, filsafat, kalam* dan lain-lain masyarakat kini lebih banyak merujuk kepada tokoh-tokoh kampus ketimbang mendatangi kiai-kiai di pesantren. Keadaan ini akan jelas jika kita bandingkan prestasi kiai di masa lalu.

Di masa lalu banyak dijumpai karya-karya kiai berbahasa Arab dari pesantren-pesantren, seperti tafsir *al-Munir li Ma'alim at-Tanzil*, *Syarh Uqud al-Lujain*, dll karya Nawawi al-Bantani (1813-1897), *Manhaj Zhawian an-Nazhar*, *Mubibah Dxi al-Fadhl ala Syarh Muqaddimah Bafadhal*, dll karya Mahfudz at-Tirmisi (w.1919) (Mas'ud; 2004). Kini karya-karya kiai semacam

itu masa kini sudah jarang dijumpai atau mungkin malah tidak ada lagi. Dalam konteks masa kini, mestinya kelas keilmuan kiai di pesantren sejajar dengan professor di universitas Islam, sehingga kiai menjadi rujukan dalam disiplin keilmuan Islam bagi mahasiswa dan dosen-dosen.

Pergeseran otoritas kiai seperti itu disertai pula oleh pergeseran orientasi di masyarakat. Berkembangnya pendidikan formal di luar pesantren yang berorientasi pada dunia kerja telah mengurangi minat masyarakat untuk mengkaji kitab-kitab di pesantren dengan sistem salafiyah. Pergeseran ini memang direspon oleh pesantren dengan membuka program pendidikan formal seperti MTs-MA atau SMP-SMA, sehingga sekolah di pagi hari dan ngaji di sore hari. Namun hal ini mungkin bisa positif karena santri dapat membekali dirinya dengan ilmu agama dan umum tapi mungkin juga akan mengganggu konsentrasi santri dalam kajian kitab. Dengan solusi seperti ini kemungkinan besar para santri akan meninggalkan pesantren setamat dari MA atau SMA dan tidak berminat mengkaji kitab yang lebih tinggi. Karena pergeseran ini, kini kajian kitab-kitab tinggi seperti *al-hikam* Ibn Athailah, *Futubat al-Makkiyah* Ibn Arabi, *Fatt al-Rahman* karya Zakaria al-Anshori misalnya

tidak sempat diajarkan kepada mereka. Selain itu dengan adanya santri yang merangkap di pendidikan formal, lebih-lebih di luar pesantren, akan mengurangi frekuensi keberadaan santri di dalam pondok atau asrama. Kondisi seperti ini tentu tidak kondusif untuk transformasi nilai, jiwa dan idealisme pesantren oleh kiai (Fahmi Zarkasyi; 2007).

2. Harapan Santri Belajar di Pesantren

Pergeseran kepemimpinan intelektual kiai ke kepemimpinan politik berperan pada orientasi santri dalam belajar di pesantren. Apakah santri yang belajar di pesantren masih istiqamah semata-mata *tafaqquh fiddin*, mendalami ilmu-ilmu agama dan melaksanakan dakwah agama setelah mereka kembali ke masyarakat, ataukah para santri sudah mengalami pergeseran orientasi. Mereka juga mungkin sudah mulai berfikir bagaimana menjadi santri memahami agama tetapi juga memerlukan bekal hidup, mereka juga merupakan calon-calon pemimpin umat yang harus memiliki kemampuan untuk memimpin bahkan mereka juga seyogyanya memiliki kesempatan untuk masuk ke sektor-sektor formal bahkan menjadi pemimpin umat. Bukankah umat Islam yang mayoritas di republik tercinta ini memiliki tanggung jawab

dalam rangka melaksanakan peran khalifah (bukan khilafah bentuk pemerintahan yang diusung oleh kelompok tertentu) di muka bumi untuk menebarkan nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil alamin*, dan sekaligus dapat mempersiapkan diri dengan kompetensi yang dibutuhkan; kompetensi individual, sosial, intelektual dan profesional.

Bagaimana pandangan santri menyangkut harapannya belajar di pesantren dan sistem pendidikan pesantren yang ideal/diinginkan. Menarik untuk dilihat hasil penelitian Puslitbang Penda tahun 2005 tentang pandangan hidup komunitas santri. Temuan penelitian itu menyebutkan sedikit santri (21,6 %) yang hanya ingin belajar *tafaqquh fiddin*. Justru sebagian besar santri (71,6 %) menginginkan untuk tidak sekedar belajar agama semata, tetapi lebih dari itu mereka berharap dapat belajar berbagai ilmu dan keterampilan.

Lebih lanjut temuan penelitian itu adalah sebagian besar santri (45,9%) memandang pendidikan modern di pesantren merupakan pendidikan yang paling diinginkan. Hanya (19,3%) dari santri yang menginginkan pendidikan Salafi atau semata-mata belajar agama (*tafaqquh fiddin*) yang dianggap ideal. Artinya, sebagian besar santri menginginkan

sistem pendidikan yang mengandung unsur pendidikan modern dan kepesantrenan. Hal ini menunjukkan kecenderungan keterbukaan santri menerima sistem modern dalam artian pendidikan yang berorientasi modernitas dan berbasis iptek tapi tetap mempertahankan kultur pesantren (Fuaduddin; 2005).

Sampai dasawarsa 50-an lembaga pesantren masih merupakan satu-satunya lembaga pendidikan bagi kalangan "santri" yang menghendaki anaknya tetap menjadi santri yang akan melanjutkan cita-cita orangtua dan masyarakat. Pendidikan pesantren merupakan sebuah investasi individual, keluarga serta sosial. Setiap ada anak yang akan berangkat ke pesantren malam harinya dilakukan pengajian di rumahnya, orang-orang kampung berdatangan memberikan dukungan, doa serta pemberian yang bermacam, ada yang sarung, baju, kopiah, uang, beras, dsb. Besoknya mereka ramai-ramai mengantarkan sampai stasiun kereta api atau stasium bus. Orang kaya tidak sedikit yang bercita-cita mengambil menantu lulusan pesantren, khususnya tamatan pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena hanya santri keluaran Jawa Tengah dan Jawa Timur saja yang berhak menyandang gelar kiai. Nama-nama pesantren Jombang, Kediri,

Lasem, Rembang, Situbondo menjadi terkenal. Sebaliknya sekolah umum belum populer dan masih banyak yang menolak karena dianggap tidak islami (Fuaduddin; 2001).

3. *Orientasi Pendidikan Pesantren*

Studi tentang pesantren yang dilakukan selama ini lebih banyak ditujukan kepada pesantren salafiyah yaitu lembaga pendidikan Islam tradisional yang mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam berdasarkan literatur klasik. Para santri belajar memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam (*tafaqqub fiddin*) dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari (Geertz; 1960, Madjid; 1974, Abdurrahman Wahid; 1974, Steenbrink; 1974, Zamakhsyari Dhofier; 1980, Mastuhu; 1994).

Hasilnya menggambarkan pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional, tidak mudah menerima perubahan, seperti suatu pribadi yang sukar diajak berbicara mengenai perubahan, sulit difahami pandangan dunianya dan karenanya orang enggan membicarakannya. Pesantren dianggap "cagar masyarakat" hampir-hampir sebagai lambang keterbelakangan dan ketertutupan (Dawam Rahardjo; 1974). Kehidupan keagamaan pesantren hanya berkisar kepada

kepentingan akhirat yang bertujuan untuk memperoleh pahala dan lebih banyak berfikir nasib mereka di kubur, lebih banyak berbicara antara kuburan dan pahala (Geertz; 1959). Pesantren adalah simbol kebekuan dalam pandangan orang hingga belasan tahun yang lalu, untuk itu harus ada kelompok dinamis yang akan memulai modernisasi, walaupun masih ada yang mempertahankan tradisi (Abdurrahman Wahid; 1987).

Padahal pesantren sebenarnya melakukan perubahan namun secara gradual, yang menurut Steenbrink (1974) “menolak dan mencontoh”. Pesantren melakukan sejumlah akomodasi dan penyesuaian yang mereka anggap tidak hanya mendukung kontinuitas pesantren sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi para santri seperti sistem penjenjangan, kurikulum yang lebih jelas dan sistem klasikal. Nurcholish Madjid (1997) menjelaskan dunia pesantren yang bersikap “enggan dan rikuh” dalam menerima modernisasi, sehingga tercipta kesenjangan antara pesantren dengan dunia luar. Tetapi secara gradual pesantren melakukan adaptasi, akomodasi dan konsesi tertentu untuk kemudian menemukan pola yang dipandanginya cukup tepat guna menghadapi modernisasi dan perubahan yang kian cepat dan berdampak luas.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam *indigenous* muncul dari pengalaman sosiologis masyarakat lingkungannya memiliki keterikatan erat dan tak terpisahkan dengan masyarakat lingkungannya. Pesantren dalam konteks ini dengan kiainya memainkan peran sebagai makelar budaya (Geertz; 1960). Konsep tersebut kemudian dikembangkan oleh Horikoshi (1976) dimana kiai tidak hanya berperan sebagai makelar budaya, namun secara kreatif melakukan karya-karya nyata (pembangunan) meskipun dalam situasi sulit. Kiai mampu berperan sebagai penyampai aspirasi masyarakat bawah disamping menerjemahkan pesan-pesan dari luar. Dengan kata lain kiai berperan sebagai mediator atau *mediating cultural broker*. Ekspansi pesantren yang semula hanya *rural based institution* kemudian berkembang menjadi lembaga pendidikan urban (Azra: 1997).

Pesantren salafiyah-tradisional meskipun telah membuka diri untuk beradaptasi dengan sistem sosial di luarnya, namun sistem pendidikan yang diselenggarakan masih tetap berorientasi kepada peran dakwah keagamaan, peran pelestari dan transmisi tradisi Islam dan reproduksi ulama. Akibatnya para lulusannya kurang *compatible* dengan dunia modern

yang memerlukan keahlian maupun keterampilan tertentu. Mereka akan mengalami kesulitan dalam melakukan mobilitas intelektual maupun sosial. Padahal sebuah sistem pendidikan seyogyanya mencakup selain peran sosialisasi juga mempersiapkan peserta didik menjadi warganegara yang demokratis, nilai-nilai moral, serta berbagai kemampuan menghadapi persoalan masyarakat termasuk berbagai keterampilan hidup (Taba;1962)

Dalam sejarah perkembangannya, muncul pesantren modern Darussalam Gontor dengan berbagai inovasi dan pembaharuan yang dilakukan. Di antaranya adalah penguasaan bahasa Arab dan Inggris untuk membekali alumni mereka dapat berkiprah di dunia internasional. Ali Saefullah (1974) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa latar belakang berdirinya Pesantren Darussalam, Gontor, pada tahun 1926 adalah tuntutan sejarah dan kebutuhan umat Islam untuk berkiprah dalam kegiatan internasional. Saat itu Indonesia mengalami kesulitan mencari anggota delegasi ke *Muktamar Alam Islami* di Mekkah yang mampu berbahasa Arab dan Inggris yang tidak dapat dipenuhi oleh keluaran pesantren “tradisional” yang ada pada waktu itu.

Menurut Saefullah pada periode awal terlalu banyak tantangan yang

dihadapi pesantren Darussalam, Gontor. *Pertama*, bagaimana merumuskan konsep sistem pendidikan pesantren yang mampu memenuhi kebutuhan umat Islam saat itu. *Kedua*, meskipun menganut sistem pendidikan modern namun tetap mempertahankan ideologi pendidikan pesantren dengan mengembangkan nilai-nilai positif di dalamnya serta mempertahankan kontinuitas sejarah lembaga pendidikan pesantren. Selain itu masih diperkuat dengan hubungan geneologis dengan para pengasuh pesantren Tegalsari, salah satu pesantren tradisional yang banyak dikenal masyarakat serta dalam pemahaman keagamaan masih termasuk mazhab Sunni.

Hingga sekarang banyak alumni Gontor mengembangkan sistem pendidikan pesantren ala Gontor yang tersebar hampir di seluruh Indonesia, dengan berbagai pengembangannya sesuai dengan kondisi, potensi dan masyarakat pendukungnya. Program pendidikan yang mengutamakan kemampuan bahasa asing serta keterbukaan yang menjadi ciri pendidikannya, akan memungkinkan lulusannya memiliki akses untuk melakukan mobilitas intelektual dan sosial. Namun harus diakui beban kurikulum yang masih menjadikan matapelajaran ilmu agama menjadi

core kurikulum, maka peran dakwah keagamaan masih tetap lebih dominan.

Pada dekade 70-an dan 80-an LSM banyak melibatkan pesantren sebagai mitra dalam pembangunan dengan alasan lebih dekat dan mengetahui seluk beluk masyarakat yang ada di lapisan bawah, seperti alternatif model pembangunan yang diintrodusir David C. Korten "*people centered development*". Meskipun harus diakui sejumlah kendala yang dihadapi pesantren antara lain; kepemimpinan pesantren yang sentralistik dan hierarkis, kelemahan bidang metodologi serta munculnya gejala disorientasi (Fajar; 1997).

Sejumlah pesantren berupaya memberikan respon positif terhadap berbagai program pembangunan masyarakat khususnya dengan menyelenggarakan berbagai program keterampilan, seperti; pesantren Darul Fallah Ciampea Bogor, Pesantren Pabelan (BPPM), Maslakul Huda Pati (BPPM), Tebuireng (UKPT), Sabilul Hasanah Muba Sumsel, Pondok Karya Pembangunan, termasuk Pesantren Hidayatullah Balikpapan.

Dari hasil pengamatan sementara sebagian pesantren berhasil mengembangkan program keterampilan. Namun tidak sedikit pesantren yang kurang/tidak berhasil dalam penyelenggaraan program keterampilan.

Kemungkinan faktor-faktor kultural, sistem pendidikan maupun lingkungan sosial pesantren kurang mendukung keberhasilan program keterampilan. Program keterampilan pada hakekatnya merupakan program penunjang (*life skill*), bukan program keterampilan dan keahlian yang dipersiapkan untuk memasuki dunia modern yang memerlukan differensiasi, spesialisasi dan profesionalisasi. Program keterampilan biasanya dipersiapkan mereka yang tinggal di wilayah pedesaan dengan pertaniannya serta sektor informal lainnya.

Pesantren keterampilan secara kultural merupakan bagian dari pengawetan kultur pedesaan yang agraris. Artinya lulusan pesantren dengan program keterampilan secara ekonomi diharapkan dapat hidup mandiri pada saat kembali ke masyarakat.

Salah satu model pesantren yang merupakan sebuah fenomena kekinian adalah pesantren salafi-haraki. Pesantren ini mengusung cita-cita pemurnian ajaran Islam secara lebih literal, tekstual dan normatif. Lebih dari pada itu, pesantren ini berupaya melalui pendidikannya untuk menghasilkan ulama 'amilin yang siap berdakwah dan berjihad *fi sabilillah* dalam penegakan syariah Islam secara *kaffah*. Penegakkan Syariah Islam merupakan

satu-satunya jalan keluar bagi umat Islam dari keterpurukan yang dialami sekarang.

Kemunculan pesantren salafiharaki dimungkinkan karena faktor-faktor internal dan eksternal. *Faktor internal* antara lain sistem pendidikan dan pola pemahaman agama yang lebih bersifat 'amali, kurang memberi ruang gerak pemahaman yang bersifat *nadhari*. Melakukan kajian kritis atau penafsiran ulang terhadap teks-teks suci Al-Quran dan Hadits tidak memperoleh tempat di kalangan mereka. *Faktor eksternal* adanya hegemoni Barat terhadap negara-negara Islam. Pihak Barat juga dianggap membantu dan mendikte pemerintah Indonesia untuk bersikap represif terhadap umat Islam. Pemerintah Indonesia yang ada sekarang juga dinilai sebagai pemerintahan "thogut" yang mendasarkan kebijakan dan program pemerint-tahannya yang sekuler serta menyalahi syariat Islam. Seperti kebijakan pemerintah yang membiarkan berkembangnya budaya sekuler yang hedonistik, perjudian, perzinahan, minuman beralkohol (*hamr*),

meraja-lelanya korupsi, merajalelanya pornografi dan pornoaksi serta perilaku asosial dan amoral lainnya. Umat Islam yang mayoritas merasa semakin terpinggirkan baik secara politik, dan ekonomi. Umat Islam merasa diperlakukan tidak adil dan diskriminatif. Faktor lain adalah banyaknya umat Islam yang dinilai sudah tidak murni lagi dalam mengamalkan ajaran Islam dan telah kehilangan ruh jihad. Sementara salafiharaki justru berupaya untuk mengembalikan ajaran Islam yang telah bercampur dengan tahayul, bid'ah dan churafat (TBC) kepada sumber aslinya Al-Quran dan As-Sunnah Sholihah sebagaimana difahami para sahabat salafush sholihah serta berjihad untuk menegakkannya secara kaffah.⁵ Ditambah lagi banyak tamatan madrasah atau pesantren yang tidak tertarik atau tidak mampu melaksanakan tugas-tugas dakwah khususnya pada masyarakat pedesaan lapisan bawah. Semuanya menjadi faktor munculnya pesantren "salafiharaki" yang memiliki semangat dakwah.

Pesantren salafiharaki memang terlihat lebih berorientasi kepada

⁵ Lihat makalah dan sambutan Ketua Ahlul Halli wal Aqdi Ustadz Abu Bakar Ba'asyier yang berjudul "Seruan ke arah Tathbiqus Syari'ah" disampaikan dalam Kongres Pertama Majelis Mujahidin I dan Penegakkan Syaria'ah Islam pada tgl. 5-7 Agustus 2000 di Yogyakarta. Selain itu dapat dibaca pada Panduan Pondok Pesantren Islam Al Mukmin Ngruki tahun 2003.

masyarakat pedesaan dan daerah terpencil (*outreach areas*). Alumni pesantren salafi haraki menjadikan masyarakat menjadi medan dakwah dan jihad mereka. Sementara alumni lembaga pendidikan lainnya tidak tertarik ke daerah-daerah terpencil. Karenanya jaringan mereka terbangun luas lembaga pendidikan masyarakat terpencil dan marginal baik secara geografis, sosial maupun kultural. Alumni Pesantren salafi haraki setelah tamat wajib menjalani Guru Wiyata Bhakti (GWB) sebagai da'i dan guru di sejumlah pesantren di Jawa dan luar Jawa. Banyak diantara mereka yang tidak kembali karena diperlukan oleh pesantren atau madrasah dimana mereka bertugas. Alumni yang melanjutkan ke perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun luar negeri jumlahnya terbatas. Pernah dibuka Ma'had Aly untuk memberi kesempatan kepada para alumni KMI/KMA dan MA untuk meningkatkan penguasaan ilmu agama dan memberi kesempatan melanjutkan ke jenjang pendidikan S1. Namun program Ma'had Aly akhirnya ditutup karena kurang diminati dengan alasan merasa tidak banyak memperoleh manfaat khususnya dalam pemahaman ilmu agama yang bersumber dari literatur yang berbahasa Arab serta pemahaman keagamaan yang kurang sejalan

dengan khittah pesantren (Fuaduddin; 2003).

4. Berkembangnya Paham Keagamaan

Saat ini ada pandangan masyarakat terhadap sebagian pesantren yang mengalami perubahan sangat signifikan yang berbeda dari dunia pesantren yang *mainstream*. Pesantren tidak lagi sekedar dilihat sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki watak lentur, akomodatif dan adaptif terhadap budaya lokal, tetapi ada sebagian pesantren yang lebih menampakkan arus pemikiran, ideologi dan kelompok sosial serta aktivitas-aktivitas gerakan yang sangat masif. Pesantren salafi-haraki merupakan sebuah fenomena kekinian pesantren yang mengusung cita-cita pemurnian ajaran Islam secara lebih literal, tekstual dan normatif. Pesantren salafi-haraki mengidentifikasi diri sebagai kelompok penerus cita-cita faham *salafi* yang ditambahkan di belakangnya dengan sebutan *haraki*. Pada prinsipnya, faham ini adalah faham yang *beritaba* atau mengikuti sunnah Nabi, sahabat, tabiin dan *tabiuttabiin* yaitu sikap beragama yang hanya mendasarkan kepada al-Quran dan hadits shahih, yang menyatakan diri tidak bermazhab sekaligus menolak taklid dan mengakui pintu ijtihad tetap terbuka (Fuaduddin; 2003).

Pada disisi lain, munculnya fenomena pemikiran yang dianggap “nyleneh” yang sering dilontarkan oleh kalangan santri dengan mengedepankan wacana demokrasi, kesetaraan gender, pluralisme agama, kebangsaan, multikulturalisme, HAM dsb. Mereka berupaya melakukan kajian-kajian kritis dengan menggunakan metode kritik (*critical methodology*) terhadap tafsir-tafsir terdahulu dan berupaya melakukan tafsir ulang terhadap teks-teks suci baik dengan dalih “membumikan” al-Qur’an yang bersifat lokalis, agar sesuai dengan perkembangan tuntutan modernitas yang bersifat global. Mereka juga banyak yang menggunakan metode hermeneutika dalam mengkaji teks-teks suci termasuk al-Qur’an, yang oleh kalangan tertentu diawatirkan akan berakibat pada mempertanyakan otentisitas al-Qur’an.

C. Upaya yang Harus Dilakukan Pesantren

Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan hingga sekarang merupakan tempat terbaik bagi persemaian bibit-bibit SDM yang mampu mengembangkan wacana pemikiran keagamaan yang membangun pencerahan peradaban. Meskipun demikian tradisi konservatisme pesantren selama ini terbangun karena pola pemahaman keagamaan

yang lebih bersifat amali. Sistem pendidikan pesantren terkadang kurang memberikan ruang gerak bagi wacana berfikir kritis, berfikir secara historis dan kontekstual.

Lembaga pendidikan pesantren memiliki peluang berperan lebih luas dan strategis lagi karena sejumlah faktor berikut :

1) *Potensi Intelektual Pesantren*

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang berkhidmat dan istiqamah dalam pelayanan pendidikan dan dakwah umumnya memiliki tradisi keilmuan atau intelektual yang sangat kuat dan terjaga secara berkelanjutan. Kiai senantiasa mempersiapkan diri dengan tradisi dan pengalaman panjang dalam penguasaan ilmu agama; ahli Tafsir, Hadits, Fiqh, Ushul Fiqh, Ilmu Alat (bahasa Arab), dsb. Karenanya muncul adanya spesialisasi dan penguatan salah satu bidang ilmu agama pada pesantren tertentu berdasarkan kepada spesialisasi atau keahlian yang dimiliki kiainya (ahli Tafsir, Hadits, Tasawuf, Ilmu Alat, Ilmu Falak, dsb.)

Para kiai biasanya telah mempersiapkan siapa-siapa saja yang diharapkan dapat melanjutkan tradisi intelektual tersebut melalui rekrutment dan selektifitas yang hanya diketahui oleh kiai. Menurut Dhofier (1982) sarana utama para kiai dalam melestarikan tradisi (intelektual)

pesantren dilakukan melalui; *recruitment* keluarga terdekat, mengembangkan jaringan aliansi perkawinan endogamous antara keluarga kiai, serta tradisi transmisi pengetahuan dan rantai transmisi intelektual antar sesama kiyai dan keluarganya. Sisi lain semakin banyaknya generasi penerus kepemimpinan pesantren lulusan (S1, S2 dan S3) Perguruan Tinggi baik Perguruan Tinggi Agama Islam baik dari Dalam Negeri maupun Timur Tengah maupun Perguruan Tinggi Umum. Semuanya akan memperkuat tradisi intelektual pesantren yang memungkinkan peran pesantren lebih luas.

Pesantren merupakan pusat khazanah intelektual Islam mulai dari periode klasik, pertengahan sampai modern/kontemporer, dengan berbagai aliran faham keagamaan/mazhab baik sunni maupun di luar sunni, termasuk penguatan kemampuan bahasa Arab (dan bahasa Inggris) sebagai ilmu alat menggali khazanah intelektual Islam yang umumnya berbahasa Arab maupun yang ditulis dalam bahasa Inggris.

Dengan potensi intelektual yang dimiliki pesantren memungkinkan menjadikan dirinya sebagai "*Islamic Center of Excellent*" kalau saja para kiai dan pimpinan pesantren menyadari bahwa keunggulan yang dimiliki

pesantren adalah penguasaan ilmu-ilmu agama dengan semua ilmu pendukungnya. Namun perlu dilakukan spesialisasi dan seleksi calon-calon ulama yang berminat mendalami ilmu-ilmu agama. Dengan demikian akan dilahirkan ahli-ahli agama dengan bidang tertentu, seperti ahli ilmu alat, fiqh, tafsir, hadist, tasawwuf, bahasa Arab, dsb. Kebijakan mengembangkan Ma'had Aly merupakan salah satu upaya strategis yang perlu dikembangkan di masa mendatang. Karena misinya menghasilkan ahli ilmu agama atau kader-kader ulama, maka jumlahnya perlu dibatasi sesuai dengan SDM bidang keahlian yang dimiliki (Puslitbang Penda; 2002). Bukankah perintah untuk mencari ilmu (agama) ditujukan untuk sebagian umat dan tidak bersifat massal.

2) *Legitimasi Sosial*

Pesantren secara kelembagaan diakui oleh masyarakat sebagai wadah yang melahirkan kepemimpinan agama. Kepemimpinan tersebut berupa otoritas keilmuan kiai sebagai pemimpin spiritual keagamaan yang memberikan rasa aman, dan dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial dengan rasa *ta'dhim* dan kharismatik. Kepercayaan dan harapan masyarakat tersebut menuntut pesantren menjaga kesinambungan

kepemimpinan spiritual dan moral agama dengan mempersiapkan calon-calon ulama dan da'i/muballigh yang mumpuni melalui sistem pendidikan yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Dalam dunia pesantren sendiri terdapat sejumlah pesantren kecil-kecil yang karena hubungan intelektual dan kultural menginduk kepada pesantren besar (induk) dimana mereka sebelumnya nyantri kepada kiainya. Karenanya dalam mempersiapkan calon-calon pimpinan pesantren tersebut akan menginduk kepada pesantren-pesantren induk masing-masing. Dengan demikian sejumlah pesantren induk akan tetap mempunyai tanggung jawab kepemimpinan pesantren khususnya serta kepemimpinan sosial pada umumnya mendorong untuk menghasilkan calon-calon ulama dan da'i/muballigh yang diakui dan diterima masyarakat maupun dalam komunitas pesantren sendiri. Peran tersebut tampaknya tidak sepenuhnya dapat dilakukan oleh alumni perguruan tinggi agama yang oleh masyarakat sering dianggap lebih dipersepsikan sebagai cendekiawan, sarjana atau *scholar*.

3) Potensi Kultural

Sebuah pesantren memiliki elemen-elemen kiai, santri, masjid, Pondok dan kitab kuning. Dengan elemen yang ada, komunitas pesantren

membiasakan diri hidup dalam tradisi santri yang sarat dengan nilai-nilai kesucian, acuan moral dan kesalehan individual. Melalui tradisi yang dikembangkan pesantren mampu membangun lingkungan sosial kultural yang memungkinkan para santri membiasakan diri bagaimana seorang calon ulama dan da'i/muballigh mempersiapkan diri yang *rasikh fiddin* serta kesalehannya sebagai panutan umat harus berperilaku baik sebagai individu maupun anggota masyarakat.

Para santri melalui keteladanan dan panutan kiai berupaya menjadikan dirinya bersikap, berperilaku dan beribadah sebagai bentuk adaptasi dan sekaligus pengkaderan untuk membentuk kader *faqihu zamanibi*. Melalui interaksi sosial dalam lingkup budaya pesantren yang kental dengan nilai-nilai hidup asketism, kesalehan individual atas dasar legitimasi teologis menjadikan pesantren memungkinkan menghasilkan calon-calon ulama dan da'i/muballigh yang dibutuhkan umat.

Tampaknya di luar lembaga pendidikan pesantren tidak terlihat lingkungan kultural yang memungkinkan lahirnya calon-calon ulama dan da'i/muballigh yang mumpuni, menguasai ilmu-ilmu agama yang dibarengi dengan kesalehan dan berhidmat bagi pendidikan dan dakwah agama. Bagaimana seseorang akan menjadi

ulama bila dalam keseharian interaksi sosialnya tidak bersentuhan dengan ulama sementara lingkungan tidak kondusif bagi lahirnya kader ulama. Pantaslah bila Gus Dur dalam sebuah penelitian mengungkapkan bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan dimana sosialisasi dan penanaman nilai-nilai ajaran agama berlangsung dapat memunculkan “*enclave*” dan mengalami proses keterpisahan kultural (sub kultur). Pesantren sebagai sub kultur yang memiliki keunikannya sendiri dalam berbagai aspek seperti: cara hidup yang dianut, pandangan hidup dan tata nilai dan norma yang diikuti, serta hierarki kekuasaan intern tersendiri yang ditaati sepenuhnya (Wahid;1974).

Namun bila seluruh pesantren akan menyelenggarakan *tafaqquh fiddin* dalam artian mendalami ilmu-ilmu agama, bukankah anjuran untuk tugas *tafaqquh* hanyalah sebagian (kecil). Karenanya ada baiknya pesantren mengembangkan peran pendidikan dan pengembangan sosial lainnya. Dan itu sudah dimulai dan harus ditingkatkan sesuai dengan tuntutan perubahan setting sosial yang ada. Kalau tidak maka umat Islam akan tetap pada lapisan *asfala saafilin*, dan kalau ini yang terjadi maka lembaga pendidikan Islam khususnya pesantren

tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya.

Upaya mengembangkan sistem pendidikan pesantren dalam konteks perubahan sosial, perkembangan iptek serta modernitas seyogyanya *Tafaqquh fiddin* sebagai basis pengembangan sistem pendidikan, meskipun tafaqquh fiddin mencakup dimensi intelektual (core kurikulum), kultural (tradisi pesantren) maupun sosial (struktur dan hierarki kepemimpinan).

Pengembangan model pendidikan pesantren juga harus didasarkan pada diversifikasi model pendidikan pesantren dengan potensi dan keunggulan yang dimiliki masing-masing pesantren. Bagi pesantren yang memiliki visi, misi, potensi dan keunggulan untuk berhidmat mendalami ilmu agama atau *tafaqquh fiddin* maka perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya, diberi bantuan yang memungkinkan sebuah pesantren tumbuh berkembang menjadi pusat kajian agama melalui Ma’had Aly bahkan dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi perguruan tinggi yang mengkaji dan mendalami bidang Tafsir (Sekolah Tinggi Ilmu Tafsir), Sekolah Tinggi Ilmu Hadits, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa dan Sastra Arab dst. Langkah

ini pada dasarnya bentuk pelembagaan sistem pendidikan Salafiyah yang selama ini secara kurikuler telah menjadi tradisi mereka dengan teks-teks klasik (kitab kuning). Model ini mungkin sama dengan munculnya pusat-pusat kajian agama seperti di berbagai negara Islam.

Pengembangan sistem pendidikan pesantren juga memperkuat dan meningkatkan kualitas pembelajaran mata pelajaran sains bagi pesantren yang telah membuka pendidikan formal baik madrasah maupun sekolah umum. Sistem *boarding* yang berlaku di pesantren sangat memungkinkan bagi upaya peningkatan program pengayaan, pembelajaran intensif, dan bimbingan belajar. Persoalannya bagaimana pola rekrutmen tenaga-tenaga pengajar yang berkompeten, memiliki komitmen dan kepedulian terhadap masa depan pesantren.

Penguatan pendidikan Iptek di pesantren pada dasarnya merupakan upaya mengoptimalkan program kurikulum yang selama ini diterapkan di madrasah atau sekolah umum yang diselenggarakan di lingkungan pesantren. Dengan penambahan bobot kurikuler, penyiapan guru yang kompeten, program pengayaan, bimbingan intensif sampai kepada pengadaan dan penggunaan berbagai fasilitas laboratorium dan buku teks, diharapkan

alumni pesantren mampu bersaing untuk masuk perguruan tinggi terbaik di dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam konteks inilah pesantren memerlukan dukungan semua pihak khususnya pemerintah agar pesantren mampu meningkatkan perannya sebagai lembaga pendidikan yang mempersiapkan santrinya memperoleh akses. Pesantren diharapkan akan mampu melakukan perubahan menuju sistem pendidikan terpadu. Dengan kata lain bagaimana sistem pendidikan pesantren mampu mempersiapkan lulusannya bersaing memperoleh tiket dan masuk ke perguruan tinggi terbaik yang akan membawa perubahan pesantren sebagai *center of excellent* bukan hanya bidang agama tetapi juga bidang sains dan teknologi.

Kepemimpinan pesantren yang mulai beralih dari kepemimpinan kharismatik ke arah kepemimpinan rasional atau dari KH kepada Drs (Steenbrink; 1974) diharapkan akan menjadi faktor pendukung utama bagi pengembangan sistem pendidikan pesantren yang integratif antara penguasaan ilmu agama dengan penguatan penguasaan iptek. Sebuah proses yang harus ditempuh oleh dunia pesantren, agar tidak tertinggal dengan perkembangan masyarakat dan menjadikan pesantren sebagai *Center of Excellent*, bukan bertahan sebagai

konservasi khazanah intelektual muslim klasik semata.

Dengan munculnya pusat kajian ilmu agama sebagai lanjutan atau pengembangan harus dijadikan basis pengembangan sistem pendidikannya. Oleh karena itu, ada kompetensi dasar (minimal) yang seharusnya dimiliki oleh para alumni pesantren yaitu kemampuan menguasai atau mendalami ajaran Islam melalui literatur-literatur klasik (yang asli), dan kompetensi penguat yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan tantangan-tantangan global.

Berdasarkan pemetaan sederhana ini, ada beberapa model pengembangan yang bisa ditawarkan, yaitu:⁶ **Model 1;** yaitu model pengembangan pesantren yang menekankan kemampuan santri pada pendalaman ajaran Islam melalui literatur-literatur atau sumber-sumbernya yang asli ditambah kemampuan mendakwahkan Islam sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional.

Untuk mewujudkan model pengembangan pesantren seperti itu, maka kitab-kitab Islam klasik yang

selama ini diajarkan perlu dipertahankan bahkan perlu dipertajam lagi seperti pendalaman terhadap karya-karya Imam Syafi'i baik al-Um maupun al-Risalah. Kemudian sebagai bekal dakwah kontemporer, suatu pola dakwah yang berbeda dengan dakwah konvensional seperti yang dialami alumni pesantren salafiyah selama ini, suatu pola dakwah yang dilakukan melalui pendekatan budaya global dan budaya modern, sehingga perlu disajikan beberapa pelajaran yang terkait dengan kepentingan tersebut seperti ilmu dakwah, strategi dakwah, pendekatan-pendekatan budaya modern dalam berdakwah, dakwah melalui berbagai media; televisi, perfilman, internet dan sebagainya. Di samping itu, perlu merekonstruksi pola-pola dakwah konvensional sehingga menjadi dakwah yang lebih fungsional terkait dengan target-target penyadaran pada Islam dan pemberdayaan sumber daya manusia.

Model 2; yaitu model pengembangan pesantren yang menekankan kemampuan santri pada pendalaman ajaran Islam melalui literatur-literatur atau sumber-sumbernya yang asli ditambah kemampuan meneliti

⁶ Mujamil Qomar dalam makalahnya yang berjudul Model-model Pengembangan Pesantren Salafiyah (Perspektif Jaringan dan Perubahan Sosial) mengusulkan 4 model pengembangan pesantren Salafiyah.

(menggali, menemukan dan mengembangkan) khazanah keislaman.

Untuk mewujudkan model 2 ini, kitab-kitab klasik yang selama ini diajarkan perlu dipertahankan, dipertajam lagi dan juga perlu menjadikan kitab-kitab modern sebagai bagian dari literatur yang diperdalam di pesantren *salafiyah*, agar didapatkan penguasaan yang komprehensif dan bersifat perbandingan (*muqarani*). Kemudian hal ini diperkuat dengan sejumlah mata pelajaran yang terkait langsung dengan metodologi penelitian terhadap bidang sosial keagamaan, seperti metode penelitian naskah, metode penelitian sejarah, metode penelitian tafsir, metode penelitian hadits, metode penelitian kualitatif, dan sebagainya; maupun yang terkait secara tidak langsung dengan memperkuat penguasaan ulum al-Qur'an, ulum al-Hadits, Ushul Fiqh, Qawaid al-Fiqh, Muqararat al-Madzahib, dan sebagainya.

Model 3; yaitu model pengembangan pesantren yang menekankan kemampuan santri pada pendalaman ajaran Islam melalui literatur-literatur atau sumber-sumbernya yang asli ditambah kemampuan kewirausahaan.

Untuk mewujudkan model 3 ini, kitab-kitab Islam klasik yang selama ini diajarkan masih perlu dipertahankan dan dipertajam lagi. Di samping itu,

perlu diperkuat dengan pelajaran-pelajaran yang terkait dengan kewirausahaan seperti dasar-dasar bisnis, kewirausahaan, ekonomi bisnis, manajemen perekonomian, dan sebagainya. Di samping itu, perlu sering dilaksanakan lokakarya atau workshop yang terkait dengan kewirausahaan, maupun pemberdayaan berbagai ketrampilan yang memiliki prospek sebagai potensi yang produktif-ekonomis.

Model 4; yaitu model pengembangan pesantren yang menekankan kemampuan santri pada pendalaman ajaran Islam melalui literatur-literatur atau sumber-sumbernya yang asli, kemudian ditambah dengan konsentrasi keahlian. Konsentrasi ini dibentuk berdasarkan kebutuhan dan tantangan-tantangan yang dihadapi sehingga jumlahnya tiga, empat atau lebih banyak lagi. Bila konsentrasi itu jumlahnya tiga dapat dicontohkan seperti konsentrasi dakwah, konsentrasi penelitian, dan konsentrasi kewirausahaan. Penggunaan model ini memang lebih berat karena pihak pesantren harus menambah tenaga-tenaga pengajar konsentrasi yang profesional dan tenaga khusus yang menyeleksi bakat dan minat santri.

Untuk mewujudkan model 4 ini, kitab-kitab klasik yang diajarkan selama ini perlu dipertahankan dan dipertajam

lagi. Di samping itu, perlu disajikan pelajaran-pelajaran yang memperkuat konsentrasi. Bila konsentrasinya tiga seperti dicontohkan tersebut, maka bagi santri yang mengambil konsentrasi dakwah, mereka wajib mengikuti pelajaran-pelajaran dalam rumpun ilmu dakwah; bagi santri yang mengambil konsentrasi penelitian, mereka wajib menempuh pelajaran-pelajaran dalam rumpun penelitian dan penambahan kitab-kitab modern; dan bagi santri yang mengambil konsentrasi kewirausahaan, mereka wajib menempuh pelajaran-pelajaran dalam rumpun ilmu kewirausahaan dan lokakarya atau workshop kewirausahaan. Apabila terdapat konsentrasi lagi, pesantren harus menyajikan pelajaran-pelajaran dalam rumpun konsentrasi itu.

Dari keempat model yang ditawarkan tersebut, tampaknya model keempat yang paling ideal. Sebab model ini dapat mempertahankan penguasaan dan pendalaman ajaran Islam melalui kitab-kitab Islam klasik dalam skala yang lebih luas daripada yang selama ini dijadikan rujukan, dan dapat memberikan keahlian lainnya secara varian sesuai dengan bakat dan minat para santri yang difasilitasi melalui konsentrasi-konsentrasi yang disajikan.

PENUTUP

Interaksi dan jaringan pesantren dengan dunia luar telah melahirkan diversifikasi sistem pendidikan pesantren dalam bentuk pesantren salafiyah-tradisional, pesantren salafiyah-modern, pesantren-modern, pesantren vocational, dan pesantren salafi-haraki. Tentu saja diversifikasi itu merupakan kekayaan baik bagi pesantren maupun pemerintah. Namun dibalik kekayaan tersebut terdapat tantangan yang perlu dihadapi dan dijawab oleh komunitas pesantren. Tantangan-tantangan pesantren seperti pergeseran kepemimpinan pesantren, harapan belajar santri di pesantren, orientasi pendidikan pesantren, dan berkembangnya faham keagamaan perlu segera dilakukan upaya-upaya yang mengarah kepada pengembangan pesantren di masa mendatang.

Adapun untuk pengembangannya ke depan, terdapat aspek-aspek yang perlu mendapat penguatan yaitu penguatan manajemen, akademik, epistemologi dan metodologi, jaringan kerjasama, dan pusat-pusat perekonomian. Sedangkan model-model pengembangannya disini ditawarkan empat model, semua model memproyeksikan penguasaan atau pendalaman ajaran Islam, kemudian ditambah

kemampuan spesifik dari masing-masing model. Model pertama menekankan keahlian berdakwah, model kedua menekankan keahlian meneliti, model ketiga menekankan keahlian berwirausaha, dan model keempat memberikan pilihan berbagai keahlian. Tampaknya model keempat yang paling ideal untuk diterapkan.

Akhirnya, dalam konteks pengembangan sistem pendidikan pesantren perlu dilakukan dialog berkesetaraan dan bermartabat di kalangan sesama anak bangsa termasuk komunitas pesantren bagi penguatan masyarakat Indonesia yang lebih demokratis dan berkeadaban. Pesantren memiliki akar kultural, akar sosial dan akar keagamaan yang kuat bagi kelangsungan NKRI, maka sudah sewajarnya diberikan advokasi, asistensi serta diperlakukan secara adil termasuk dalam pengembangan sistem pendidikan.

Dalam era demokrasi, pemerintah seharusnya memberikan dukungan penuh terhadap pesantren dalam penyelenggaraan pendidikan yang sudah lama membuka diri terhadap modernitas dan sistem pendidikan di luarnya melalui pemberdayaan dan kemitraan. Dengan dukungan semua pihak dan sistem pendidikan yang berkeadilan diharapkan akan muncul model-model pesantren yang mengu-

sai Iptek berbasis *tafaqquh fiddin* yang akan mencerahkan peradaban bangsa di masa mendatang dalam menghadapi persaingan global dan menjaga kelangsungan NKRI, karena basis pesantren adalah perpaduan unsur Keislaman, Keindonesiaan dan Keilmuan.

SUMBER BACAAN

- A.Steenbrink, Karel, (1986): *Pesantren, Madrasah dan Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta, LP3ES.
- Adams, Donald K, (1977): *Development Education, Comparative Education Review* Vol.21, Nos. 2 & 3 June/October.
- Azra, Azyumardi, (2002a): *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta, Logos.
- (2002b): *Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara*. Bandung, Mizan.
- Departemen Agama, (2002): *Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Lembaga Pendidikan Ma'had Aly*.
- Dhofier, Zamachsyari, (1982): *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kiyai*. Jakarta, LP3ES.
- Fuaduddin TM, (1994): *Orientasi Pendidikan; Varian Santri Priyayi Abangan di Indramayu*, Jakarta, Balitbang Agama
- , (2002): *Ma'had Al-Zaitun: Sistem Pendidikan, Paham Keagamaan dan*

- Interaksi Sosial*, Jakarta, Balitbang Agama Depag RI
- , (2003): *Pesantren Islam Al-Mukemin Ngruki Solo; Studi Tentang Sistem Pendidikan, Paham dan Jaringan*, Jakarta, Balitbang Agama Depag RI
- , (2003): *Pesantren Islam Al-Islam Tenggulun Lamongan; Studi tentang Sistem Pendidikan, Paham Keagamaan dan Jaringan*, Jakarta, Balitbang Agama Depag RI
- Geertz, Clifford, (1989): *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta, Pustaka Jaya, Cet. Ke-3
- Hansen, Judith Friedman, (1979): *Sociocultural Perspectives on Human Learning: An Introduction to Educational Anthropology*. New Jersey, Prentice-Hall.
- Horikoshi, Hiroko, (1987): *Kiyai dan Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M.
- Ikenberry, Oliver S, (1974): *American Education Foundations, An Introduction*. Ohio, A Bell & Howell Company.
- Jarolimek, John, (1981): *The School in Contemporary Society, An Analysis of Social Currents, Issues, and Forces*, New York, McMillan.
- Karabel, Jerome & AH Halsey, (1977): *Power and Ideology in Education*. New York, Oxford.
- Kuntowijoyo, (1993): *Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi*. Jakarta, Mizan.
- Ma'had Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur, (tanpa tahun): *Profil Ma'had Ali PP Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo*, khusus keperluan intern
- Mastuhu, (1994): *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta, INIS.
- , (1999): *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta, Logos.
- Muchtarom, Zaini, (1988): *Santri dan Abangan di Jawa*, Jakarta, INIS.
- Nurcholish Madjid, (1997): *Bilik-Bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta, Paramadina.
- Prasodjo, Sudjoko, dkk., (1982): *Profil Pesantren; Laporan Hasil Penelitian Pesantren Al-Falak dan Delapan Pesantren Lain di Bogor*, Jakarta, LP3ES.
- Rahardjo, Dawam (ed.), (1974): *Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta, LP3ES.
- , (1985): *Pergulatan Dunia Pesantren; Membangun Dari Bawah*, Jakarta, P3M
- Zarkasyi, Hamid Fahmi, (2007): *Pengembangan Institusional dan Kurikuler, Pesantren Salafiyah*, Makalah disampaikan pada *Seminar Pengembangan Pondok Pesantren Salafiyah*, diselenggarakan oleh Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI, di Hotel Purnama, Bogor, pada tanggal 8-10 Juni 2007.
- Ziemek, Manfred, (1986): *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, Jakarta, P3M